

Taxes - Law

FH R  
11h  
17.12.12.02

## Laporan Penelitian


# PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH BIDANG PERPAJAKAN DI KABUPATEN SLEMAN

Perpustakaan UAJY



0500024099



 PERPUSTAKAAN		<b>MILIK PERPUSTAKAAN</b> UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA	
Diterima	:	12 DEC 2002	
Inventarisasi	:	67/FH/Hd.12 Pen/02	
Klasifikasi	:	Rf 343.04 /pen /p	
Selesai Diproses	:		

OLEH :

G. Aryadi, SH., MH.

Y. Sri Pudyatmoko, SH., M.Hum.

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2002

Laporan penelitian ini telah diseminarkan dan disahkan pada tanggal 4 Desember 2002.

Disetujui:

Konsultan Penelitian



Drs. Paulinus Soge, SH. MHum.

Ketua Tim Peneliti:



G. Aryadi, SH. MH

Mengetahui:



Dekan Fakultas Hukum UAJY

FAKULTAS  
HUKUM

Dr. B. Ohim Sindudisastra, SH. MHum.



LPU UAJY

LEMBAGA

Dr. F. Utami Mediastika, ST. Ph.D.



## DAFTAR ISI

	Hal
Hal Pengesahan .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	9
 <b>BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Tinjauan Umum Pajak Daerah Di Kabupaten Sleman	
1. Pengaturan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman .....	12
2. Obyek Pajak.....	12
3. Subyek Pajak.....	15
4. Penetapan Utang Pajak .....	19
5. Pembayaran dan Penagihan Pajak.....	22
6. Ketentuan Pidana .....	24
B. Pelaksanaan Perda Pajak Daerah di Kabupaten Sleman	
1. Administrasi dan pendataan potensi pajak .....	25
2. Pelaksanaan pembayaran pajak .....	33
C. Penegakan Hukum Perda Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sleman	
1. Penegakan Hukum Administrasi .....	37
2. Penegakan Hukum Pidana .....	41
 <b>BAB III PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran .....	48

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1: Jumlah Hotel dan Pondok Wisata Menurut Klasifikasinya .....	28
Tabel 2: Tingkat Hunian Hotel di Kabupaten Sleman .....	29
Tabel 3: Jumlah Restoran dan Rumah Makan Menurut Klasifikasinya ....	30
Tabel 4: Obyek Hiburan di Kabupaten Sleman .....	31
Tabel 5: Jumlah Wajib Pajak Daerah di Kabupaten Sleman .....	32
Tabel 6: Penerimaan Pemerintah Kabupaten Sleman dari Pajak Daerah	35
Tabel 7: Pelanggaran Administrasi Perda Perpajakan Kabupaten Sleman	39

## Kata Pengantar

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kasih, karena berkat penyelenggaraan-Nya maka penulisan laporan penelitian PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH BIDANG PERPAJAKAN DI KABUPATEN SLEMAN telah dapat diselesaikan.

Berkenaan dengan telah selesainya penulisan tersebut perkenankanlah kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat:

- Bapak Bupati Kabupaten Sleman yang telah berkenan memberikan dukungan moril maupun materil guna penelitian ini;
- Bapak Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman yang telah berkenan memberikan bantuan dalam penelitian ini;
- Bapak Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman yang telah berkenan memberikan dukungan bantuan terhadap penelitian ini;
- Bapak Kepala Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Sleman yang telah berkenan memberikan dukungan bantuan terhadap penelitian ini;
- Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Sleman yang telah berkenan memberikan dukungan bantuan terhadap penelitian ini;
- Bapak Kepala Dinas Pertambangan Daerah Kabupaten Sleman yang telah berkenan memberikan dukungan bantuan terhadap penelitian ini;
- Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan bagi terwujudnya penelitian ini.

Akhirnya peneliti berharap semoga penelitian ini dapat digunakan dan mencapai hasil seperti yang diharapkan.

Hormat kami,

G.Aryadi, SH.MH.dkk.

# PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH BIDANG PERPAJAKAN DI KABUPATEN SLEMAN

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Adanya reformasi yang bergulir dan mengemuka sejak tahun 1998, di mana dengan dipicu oleh adanya krisis ekonomi pada akhir tahun 1997 mengantarkan semakin menguatnya tuntutan akan kebebasan dan pengakuan terhadap eksistensi daerah. Tak pelak kondisi tersebut mendorong munculnya kesadaran dari daerah untuk mendapat pengakuan dan pemberian hak-hak secara luas dan mandiri. Dengan semakin menguatnya tuntutan daerah untuk mendapatkan pengakuan eksistensi dan kemandirian, di mana sebelumnya mereka merasa mendapat perlakuan kurang adil maka hal tersebut diakomodir dengan keluarnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Akan tetapi kiranya tidak cukup untuk mengandalkan adanya pengakuan dan pemberian otonomi yang luas saja. Hal tersebut mengingat kondisi dan kemampuan masing-masing daerah sangat beragam. Bagi daerah-daerah yang dengan potensi daerah yang cukup besar, di mana selama ini mereka merasa sebagai "perahan" dari pemerintah pusat, maka pemberian otonomi yang luas berarti sebuah perubahan yang cukup menjanjikan. Adanya perubahan ke arah perbaikan terhadap keadaan yang selama ini berlangsung. Namun demikian bagi sementara daerah lainnya yang selama ini sangat "menggantungkan diri" pada pemerintah pusat, kiranya adanya pemberian otonomi yang luas yang membawa konsekuensi di bidang keuangan tersebut akan sangat merasa kesulitan.

Segala daya yang mengarah kepada penggalan potensi akan diusahakan demi kemandirian dan kemampuan untuk menopang kelangsungan daerah. Salah satu potensi daerah yang cukup penting di samping sumber daya alam adalah pemasukan yang bersumber dari pajak. Selama ini sumber pemasukan pajak dari pusat yang masuk ke kas daerah adalah berupa Pajak Bumi dan Bangunan, di mana sebagian besar hasilnya masuk ke daerah. Bahkan pada perkembangan berikutnya sejak tahun 1994 dengan keluarnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/ KMK.04/1994 tanggal 19 Maret 1994 maka praktis semua hasil Pajak Bumi dan Bangunan masuk ke daerah, mengingat hasil pajak yang menjadi bagian dari pemerintah pusat sebesar 10% didistribusikan ke daerah dalam bentuk insentif maupun pembagian merata. Di samping Pajak Bumi dan Bangunan, jenis pajak pusat yang hasilnya masuk daerah adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, yang mulai berlaku 1 Juli 1998. Berbeda dengan Pajak Bumi dan Bangunan yang sejak awal reformasi perpajakan (*tax reform 1984*) sudah digulirkan, maka BPHTB ini lahirnya baru menyusul di belakang. BPHTB ini disebut-sebut sebagai sebuah upaya kompensasi yang diberikan kepada daerah sebagai akibat adanya perampangan dan penyederhanaan terhadap jumlah pajak dan retribusi daerah yang menjadi sangat sedikit semenjak adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Hasil yang diperoleh dari BPHTB itupun juga sebagian besar (80%) masuk kas daerah, bahkan sisanya yang menjadi bagian dari pemerintah pusat (20%) itu juga didistribusi ke daerah secara merata.

Selain kedua jenis pajak pusat tersebut untuk pemasukan daerah dari sumber pajak dan retribusi masih ada beberapa jenis pajak dan retribusi daerah. Khususnya untuk pajak daerah Kabupaten (dahulu Pajak Dati II), meliputi: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan,

Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir. Sebagai dasar hukum dari ketujuh jenis Pajak daerah tersebut adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di samping itu daerah masih dapat memungut pajak yang lain sepanjang belum dikenakan pajak baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah propinsi, bentuknya berupa pajak yang ditetapkan dengan menggunakan dasar Peraturan Daerah. Dari sisi ini dapat dipahami bahwa sasaran pengenaan pajak yang dikenakan oleh daerah khususnya Kabupaten/Kota sebenarnya merupakan sasaran yang merupakan "sisir" dari apa yang sudah dikenakan pajak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah propinsi. Terhadap hal ini maka sebenarnya terbuka peluang bagi Pemerintah Kabupaten untuk secara aktif, kreatif, dan inovatif menggali segala kemampuan untuk dikenakan pajak daerah.

Sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka daerah diberi kewenangan untuk mengatur lebih lanjut pajak-pajak daerah tersebut di atas. Sejalan dengan hal tersebut khususnya untuk Kabupaten Sleman diwujudkan dengan adanya beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur hal ini. Perda-perda tersebut di antaranya adalah: Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Pajak Hotel dan Restoran, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Pajak Hiburan, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Pajak Reklame, dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan. Di antara Peraturan daerah yang ada tersebut kemudian ada yang diganti, yakni Perda Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Pajak Hotel dan Restoran. Perda tersebut digantikan oleh Perda Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pajak Hotel, dan Perda Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pajak Restoran. Dengan adanya pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Daerah tersebut maka



secara yuridis normative sudah selesai, dalam arti ketentuan hukum yang mendasarinya sudah ada, sekalipun di dalam berbagai perda yang disebutkan di atas masih terlihat adanya pendelegasian pengaturan dalam ketentuan lebih lanjut seperti dalam wujud Keputusan Bupati. Namun demikian dari sisi lain yang kiranya perlu juga mendapatkan perhatian adalah mengenai pelaksanaan ketentuan tersebut secara nyata di dalam tataran praktek. Bagaimanapun baiknya sebuah norma hukum disusun akan tetapi apabila implementasinya tidak diperhatikan, akan dapat menyebabkan kurang berartinya ketentuan hukum tersebut.

Terkait dengan masalah pelaksanaan adalah mengenai penegakan hukum (*law enforcement*). Penegakan hukum dalam bidang pajak khususnya pajak daerah sangat penting. Hal tersebut selain dari sisi hasil akan mempunyai akibat adanya output positif, juga dari sisi lain sebagai bagian dari pendidikan hukum dan perilaku masyarakat. Seperti diketahui bahwa salah satu kelemahan yang disadari di dalam pembaharuan perpajakan nasional khususnya pembaharuan perpajakan nasional yang pertama adalah lemahnya penegakan hukum itu sendiri. Di samping itu penegakan hukum juga sangat penting terutama apabila dikaitkan dengan orientasi ke depan, di mana sistem pemungutan pajak yang diharapkan dapat diwujudkan secara lebih luas adalah sistem *self assessment*. Apabila memang diharapkan untuk diterapkan sistem *self assessment* ini di dalam pajak, maka sebagai konsekuensi ikutan pemakaian sistem ini adalah adanya *tax consciousness* (kesadaran dari wajib pajak), kejujuran wajib pajak, *tax mindedness* wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak, dan *tax discipline* (kedisiplinan wajib pajak) terhadap pelaksanaan peraturan pajak (Rochmat Soemitro 1991:14). Sebab seperti diketahui sistem *self assessment* memberikan kepercayaan yang begitu besar kepada wajib pajak untuk menghitung, menetapkan dan kemudian membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Sistem ini baru akan berjalan dengan baik apabila syarat-syarat yang disebutkan di atas dipenuhi. Untuk mengimbangi kepercayaan yang besar tersebut maka biasanya diimbangi dengan adanya ketentuan pemberatan

sanksi. Akan tetapi seperti telah disinggung di muka apakah artinya sanksi apabila semuanya itu tidak dilakukan dan ditaati.

Posisi dari pajak-pajak daerah tersebut dalam menopang keuangan daerah sangat strategis mengingat sumber pemasukan dari pajak itu tidak mungkin akan habis. Oleh karena itu penting untuk diperhatikan adalah mengenai pelaksanaan kewajiban pajak itu sendiri, di mana untuk itu melibatkan berbagai pihak, seperti kas daerah yang menerima pembayaran pajak, dinas terkait seperti dinas pariwisata, dinas trantib, penyelenggara hiburan, pengelola hotel dan restoran, pihak yang menyelenggarakan reklame, pihak yang menyelenggarakan eksploitasi bahan galian golongan C, Penyelenggara reklame serta pihak-pihak yang terkait lainnya.

Keseriusan dan kesungguhan dari para pihak dalam menangani permasalahan pajak dengan tekad untuk mensukseskan pemungutannya menjadi sangat diharapkan. Pelaksanaan pemungutan tidak hanya didasarkan pada adanya target dalam bentuk sesuai jumlah hasil yang diinginkan. Juga bukan berarti bagi para pejabat terkait dapat dikatakan sukses begitu saja apabila mereka tidak dikenakan sanksi. Melainkan semua pihak tentu merasa terpanggil untuk menegakkan semua aturan itu secara disiplin, yang diharapkan dengan sendirinya akan membawa hasil yang lebih baik tanpa ada motivasi insentif.

Seperti diketahui dengan adanya target penerimaan dari sektor pajak maka yang terjadi adalah bukan bagaimana ketentuan pajak itu dapat dipenuhi akan tetapi lebih didasarkan pada seberapa besar jumlah pajak itu diperoleh. Dengan kata lain jumlah yang ditargetkan itu di bawah jumlah yang ditetapkan. Memang ada toleransi-toleransi tertentu untuk dapat diterapkan dalam pelaksanaan pemungutan pajak, seperti apa yang ada dalam asas finansial bahwa rasio antara biaya dan hasil itu harus bersifat negatif (bdk Rohmat Soemitro 1992: 40). Dengan asas tersebut maka pemungutan akan dipertanyakan apabila perimbangan antara biaya dan hasil pungut itu justru lebih besar biaya pungutnya. Akan tetapi apabila rasio antara biaya pemungutan dan

hasil pajak itu masih cukup baik tidak ada alasan untuk menghentikan upaya pemungutan secara aktif sekalipun target penerimaan dari sektor pajak itu sudah tercapai.

Sisi lain yang perlu diperhatikan bahwa sebagian ketentuan pajak itu terkandung adanya kelemahan tertentu. Di mana kelemahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu yang dapat mengakibatkan adanya kerugian bagi kas pemerintah.

Penentuan mengenai wajib pajak di dalam Pajak hiburan misalnya yang hanya dikatakan orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Di sini terlihat bahwa yang diharapkan dapat dikenakan pajak itu sangat banyak karena meliputi semua penyelenggara berbagai hiburan yang menjadi obyek pajak. Akan tetapi tentu semua itu akan menjadi kurang berarti apabila ternyata dalam praktek banyak penyelenggara hiburan yang tidak terjangkau yang akhirnya tidak memenuhi kewajiban pajak. Apalagi dalam ketentuan itu juga tidak terlalu jelas apakah diterapkan *sistem self assessment* atau *official assessment* secara penuh. Hal serupa juga terjadi di dalam Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Pengaturan yang seperti itu kiranya memerlukan adanya prakondisi sebagai syarat efektivitas implementasinya. Harapan yang terlalu besar dengan merentangkan jangkauan yang demikian luas menjadi sebuah pilihan kebijakan yang diambil dalam mensikapi permasalahan pajak daerah. Di sisi lain perlu pencermatan untuk mengoptimalkan pemberlakuan ketentuan yang ada dengan meminimalisir kemungkinan penyimpangannya. Salah satu yang kiranya menjadi sebuah keharusan adalah pengawasan yang memadai baik bagi wajib pajak maupun para aparaturnya sendiri. Hanya saja menjadi pertanyaan kiranya bagi mereka yang hanya menjadi wajib pajak dalam skala kecil, seperti penyelenggara hiburan yang dilakukan secara insidental dan kecil-kecilan, apakah ini akan dapat terawasi secara baik. Apabila mereka dibiarkan juga bukankah lalu ada ketidakadilan mengingat dalam pajak-pajak daerah ini diterapkan tarif proporsional. Apabila hal itu terjadi, keadilan dalam pembebanan pajak-pajak daerah yang didasarkan pada *benefit principles* menjadi tidak

terpenuhi (bdk. Richard A Musgrave & Peggy Musgrave 1984:460). Oleh karenanya yang menjadi persoalan adalah mengenai pengawasan terhadap mereka , dan sekaligus komitmen mereka untuk secara bersama-sama menjunjung tinggi supremasi hukum.

## B. Permasalahan

Adanya otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab seperti yang diatur di dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 mengantarkan daerah untuk kembali menata ke dalam. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan terutama yang ada kaitannya dengan relasi pusat-daerah menjadi sesuatu hal yang perlu untuk mendapatkan perhatian, tak terkecuali masalah keuangan. Masalah keuangan sangat penting mengingat segala aktivitas pemerintahan baik itu menyangkut *public service*, pelaksanaan tugas pemerintahan sehari-hari, maupun rencana-rencana kegiatan yang dibuat oleh pemerintah tentu tidak luput dari masalah keuangan. Secara umum hal-hal yang berkaitan dengan masalah keuangan dapat meliputi perencanaan (penganggaran), penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawabannya. Sementara dari sisi anggaran dapat dibedakan antara sisi rencana penerimaan dan rencana pengeluaran, baik yang berupa belanja rutin maupun belanja pembangunan yang bersifat investatif.

Dalam kaitannya dengan permasalahan daerah guna menghadapi tantangan kemandirian sebagai akibat adanya otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab maka hal yang sangat mendesak untuk dipikirkan adalah penggalan sumber dana. Hal tersebut terjadi karena selama ini pemasukan dana bagi keuangan daerah sebagian (besar) diperoleh dari pemberian pemerintah pusat. Penggalan dana ini dapat dilakukan melalui berbagai upaya, salah satu di antaranya adalah melalui pengintensifan penerimaan dari sektor pajak yang selama ini memang sudah menjadi sumber pemasukan bagi kas daerah.

Pengintensifan penerimaan dana dari sektor pajak ini dapat dilakukan dengan meminimalisir kemungkinan pelanggaran terhadap ketentuan di bidang pajak. Pelanggaran terhadap ketentuan di bidang pajak itu sendiri dapat terjadi di antaranya disebabkan karena memang kurang sempurnanya ketentuan yang memberikan peluang pelanggaran (*loop holes*), ketidaktahuan maupun ketidaksadaran para pihak yang mengakibatkan adanya pengurangan penerimaan dari sektor pajak ini baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sehubungan dengan luasnya cakupan dari jenis-jenis pajak daerah khususnya yang dikelola Kabupaten Sleman, maka dalam penelitian ini akan diangkat permasalahan yang dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame oleh aparat pajak dan aparat terkait selama ini di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana Pelaksanaan penegakan hukum Perda Perpajakan di Kabupaten Sleman, khususnya menyangkut lima jenis pajak tersebut di atas?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai dari penelitian ini adalah meliputi:

1. Memberikan deskripsi dan identifikasi terhadap pelaksanaan ketentuan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame di Kabupaten Sleman.
2. Memberikan gambaran mengenai kesiapan dan kesanggupan aparat di bidang pajak dan aparat terkait dalam melaksanakan penegakan hukum Perda Perpajakan.

#### D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi teoritis maupun praktis sebagai berikut;

##### 1. Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan pengetahuan pada perkembangan hukum, khususnya Hukum Pajak dan Hukum Acara. Di samping itu juga dapat digunakan sebagai salah satu masukan dan pertimbangan di dalam meneliti lebih lanjut mengenai materi ini.

##### 2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah melalui instansi terkait di Kabupaten Sleman di dalam pengambilan kebijakan di bidang Pajak Daerah, khususnya menyangkut tiga jenis pajak yang diteliti.

#### E. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk melukiskan/ menggambarkan tentang sesuatu keadaan di tempat tertentu dan pada saat tertentu penelitian dilakukan. Dalam hal ini mengenai pelaksanaan dan penegakan hukum Perda Perpajakan, khususnya untuk jenis pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame, sekaligus mencari alternatif pemecahan permasalahan yang terkait di dalamnya.

##### 2. Sumber data

Untuk pelaksanaan penelitian ini diperlukan data:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden ataupun dari nara sumber.
- b. Data sekunder, yakni data yang didapat dari arsip, buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan yang terkait erat dengan masalah yang menjadi obyek penelitian.

Responden dalam penelitian ini sekaligus sebagai nara sumber adalah anggota masyarakat yang terkait erat dengan pelaksanaan perda perpajakan di Kabupaten Sleman, yakni:

- a. Pejabat pada biro hukum Setwilda Kabupaten Sleman;
- b. Pejabat pada Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman;
- c. Pejabat pada Dinas Perindustrian Kabupaten Sleman;
- d. Pejabat pada Dinas Perekonomian Kabupaten Sleman;
- e. Pejabat pada Dinas Pertambangan Kabupaten Sleman;
- f. Kepala Seksi Penegakan Hukum Perda pada Dinas Trantib Kabupaten Sleman;
- g. Pejabat Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman.

### 3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua cara, yakni:

- a. studi pustaka, yaitu cara memperoleh data selengkap-lengkapnyanya dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundangan-undangan, dokumen-dokumen resmi, serta arsip-arsip yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti.
- b. studi lapangan, yaitu cara memperoleh data primer selengkap-lengkapnyanya dengan mengadakan penelitian secara langsung ke lapangan/ lokasi penelitian yang berhubungan dengan sasaran penelitian. Untuk melaksanakan studi lapangan ini dilakukan dengan cara:
  - 1) Kuesioner, yakni cara memperoleh data dengan terlebih dahulu dibuat daftar pertanyaan baik itu bersifat terbuka maupun tertutup

yang kemudian daftar pertanyaan tersebut diajukan kepada para responden.

- 2) Wawancara, yakni cara mengumpulkan data dengan menggunakan pedoman wawancara yang dilakukan secara mendalam terhadap responden maupun nara sumber secara langsung .

#### 4. Metode analisis data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai semua data yang telah terkumpul secara sistematis sehingga didapat suatu gambaran mengenai masalah/ keadaan yang diteliti (Suryono Soekanta, 1986: 250). Sementara untuk pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang berawal dari pengetahuan yang sifatnya umum untuk kemudian menilai suatu kejadian yang khusus. (Sutrisno Hadi ,1987:36). Dalam hal ini berangkat dari ketentuan normative mengenai pajak daerah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Perda Kabupaten Sleman untuk kemudian digunakan untuk melihat dan menganalisis fakta empiris yang terjadi di lapangan. .



## BAB II

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Umum Pajak Daerah di Kabupaten Sleman

##### 1. Pengaturan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman

Sebagai tindak lanjut terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di Kabupaten Sleman dilakukan dengan dikeluarkannya beberapa Peraturan Daerah (Perda) Perpajakan. Perda-perda tersebut di antaranya adalah: Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Pajak Hotel dan Restoran, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Pajak Hiburan, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Pajak Reklame, dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan. Di antara Peraturan daerah yang ada tersebut kemudian ada yang diganti, yakni Perda Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Pajak Hotel dan Restoran. Perda tersebut digantikan oleh Perda Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pajak Hotel, dan Perda Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pajak Restoran. Seperti dikemukakan di muka, di dalam penelitian ini hanya difokuskan kepada Pajak Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Tentang Pajak Reklame, Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. Sehubungan dengan kelima jenis pajak tersebut, dalam bagian ini akan dikemukakan mengenai berbagai hal secara normative yang berkait erat dengan pelaksanaan ketentuan pajaknya.

##### 2. Obyek Pajak

Obyek pajak atau sering juga disebut sebagai sasaran pengenaan pajak dari Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C diatur di dalam Pasal 3 Perda No.2 Tahun 1998, yakni: Kegiatan eksploitasi

bahan galian golongan C. Sementara yang dimaksud dengan bahan galian golongan C sendiri meliputi:

Asbes, andesit, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung (breksi batu apung), batu permata, batu bentonit, batu dolomit, feidspar, garam batu (halite), grafit, granit, gips, kalsit, kaolin, leosit, magnesit, mika, marmer, nitrat, obsidian, oker, pasir, kerikil dan sirtu, pasir kuarsa, perlit, phospat, talk, tanah diatome, tanah liat, tanah serap, tanah urug, tawas (alum), tras, yarosif, dan zeolit.

Untuk Pajak Hotel, mengenai obyek pajak diatur di dalam Pasal 3, yang selengkapnya berbunyi:

- (1) Obyek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel
- (2) Obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. fasilitas penginapan antara lain: hotel berbintang, hotel dengan tanda bunga melati, pondok wisata dan jenis rumah penginapan lainnya;
  - b. pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan antara lain: restoran, telepon, faximile, telex, foto copy, pelayanan cuci, setrika, taksi dan angkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola hotel.
  - c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum.
  - d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, perkantoran, pertokoan atau kegiatan usaha lainnya.

Di dalam kaitannya dengan pengenaan pajak, tidak semua sasaran pengenaan pajak tersebut kemudian dikenakan pajak, melainkan ada pengecualian terhadap obyek pajak tertentu. Pengecualian tersebut diberlakukan terhadap:

- a. penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;
- b. asrama dan pondok pesantren.
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;
- d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel;
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum. (Pasal 4).

Untuk Pajak Restoran, mengenai sasaran pengenaan pajak diatur di dalam Pasal 3 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) obyek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran;
- (2) obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi penjualan makanan dan minuman yang disertai dengan fasilitas penyantapannya. Seperti halnya dengan pajak Hotel yang mengenal adanya pengecualian terhadap obyek pajak, di dalam Pajak Restoran pun juga ada obyek pajak yang dikecualikan, yaitu terhadap sasaran pengenaan pajak berupa pelayanan jasa boga/ catering (Pasal 4).

Untuk Pajak Hiburan, di dalam Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 1998, mengenai obyek pajak ditentukan di dalam Pasal 3, yang ditentukan sebagai berikut:

- (1) obyek pajak adalah setiap penyelenggaraan hiburan;
- (2) Obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi:
  - a. Pertunjukan film;
  - b. Pertunjukan/ pagelaran Seni drama dan atau seni musik, atau seni tari tradisional;
  - c. Pertunjukan/ pagelaran Seni drama dan atau seni musik, atau seni tari modern;
  - d. Karaoke, café, dan sejenisnya;

- e. Permainan ketangkasan;
- f. Pertandingan olah raga;
- g. Pasar malam, sirkus, pameran dan sejenisnya;
- h. Taman rekreasi, kolam pancingan dan sejenisnya;
- i. Rental VCD, LD, Kaset, PS dsb.

Sementara itu untuk Pajak Reklame, yang menjadi obyek pajak menurut Pasal 3 Perda No.10 Tahun 1998 adalah: Semua penyelenggaraan reklame, yang meliputi:

- a. Reklame papan/ billboard/ megatron;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat (stiker);
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame suara;
- h. Reklame film/ slide;
- i. Reklame peragaan;
- j. Reklame dengan cahaya;

Pengecualian obyek pajak, menurut ketentuan pada Pasal 4 diberlakukan terhadap:

- a. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- c. Penyelenggaraan reklame untuk kepentingan social keagamaan.

### 3. Subyek Pajak dan Wajib Pajak

Seperti diketahui bahwa pada umumnya di dalam Pasal 1 dari setiap Peraturan Perundang-undangan banyak memuat mengenai tafsir otentik terhadap berbagai peristilahan yang digunakan di dalam Peraturan

Perundang-undangan yang bersangkutan. Di dalam Perda Kabupaten Sleman tentang Pajak Hotel, mengenai apa yang dimaksud sebagai subyek pajak dan wajib pajak juga diberikan rumusan pada Pasal 1, yakni Pasal 1.h mengatur mengenai pengertian wajib pajak, dan Pasal 1.i mengatur mengenai pengertian dari subyek pajak. Di dalam Pasal 1 h, disebutkan bahwa: "Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu."

Sementara itu mengenai pengertian subyek pajak, di dalam Pasal 1 i disebutkan sebagai berikut: "Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah." Dari rumusan kedua ketentuan tersebut terlihat betapa luasnya pengertian wajib pajak dan subyek pajak untuk Pajak Hotel ini. Akan tetapi nampaknya pengertian tersebut tidak dimaksudkan secara khusus hanya untuk ketentuan Pajak Hotel. Dengan kata lain wajib pajak dan subyek pajak sebagaimana diberikan pengertian dalam Pasal 1h dan Pasal 1.i dari Perda Pajak Hotel tersebut juga meliputi pengertian wajib pajak maupun subyek pajak daerah lainnya. Hal ini mengingat di dalam Perda yang mengatur Tentang Pajak Hotel juga diatur di bagian lain mengenai siapa itu subyek pajak dan wajib pajak, yaitu di Pasal 5. Dalam Pasal 5 tersebut ditentukan sebagai berikut:

- (1) Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel;
- (2) Wajib pajak adalah pengusaha hotel.

Dari rumusan tersebut di atas terlihat bahwa yang menjadi subyek pajak untuk Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Pembayaran di dalam rumusan pasal itu tentunya dimaksudkan pembayaran dalam kaitannya dengan kegiatan usaha hotel. Dengan demikian pembayaran itu dilakukan oleh mereka

yang menjadi konsumen jasa pelayanan yang diberikan oleh hotel. Sementara itu mengenai wajib pajaknya adalah pengusaha hotel. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa antara subyek pajak dan wajib pajak itu berada pada pihak-pihak yang berbeda. Hal seperti itu menampakkan salah satu karakteristik dari Pajak Hotel yakni bahwa Pajak Hotel merupakan pajak tidak langsung.

Di dalam Perda Kabupaten Sleman yang mengatur Tentang Pajak Restoran, mengenai wajib pajak dan subyek pajak sistem pengaturannya tidak berbeda dengan apa yang diatur di dalam Pajak Hotel, yakni di dalam Pasal 1.h dan 1.i diatur mengenai pengertian wajib pajak dan subyek pajak daerah secara umum, sementara subyek pajak dan wajib pajak yang khusus untuk Pajak Restoran diatur di dalam Pasal 5. Ketentuan Pasal 5 dari Perda tersebut menentukan sebagai berikut:

- (1) subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran;
- (2) wajib pajak adalah pengusaha restoran.

Rumusan tersebut di atas memperlihatkan bahwa yang menjadi subyek pajak untuk Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada Restoran. Pembayaran di dalam rumusan pasal itu tentunya dimaksudkan pembayaran dalam kaitannya dengan kegiatan usaha restoran. Dengan demikian pembayaran itu dilakukan oleh mereka yang menjadi konsumen jasa pelayanan yang diberikan oleh restoran. Sementara itu mengenai wajib pajaknya adalah pengusaha restoran. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa antara subyek pajak dan wajib pajak itu berada pada pihak-pihak yang berbeda. Oleh karena itu sama dengan pajak Hotel maka pajak Restoran inipun juga merupakan jenis pajak tidak langsung.

Di dalam Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Pajak Hiburan, mengenai subyek pajak dan wajib pajak diatur di dalam Pasal 4 sebagai berikut:

(1) Subyek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan.

(2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Ketentuan di atas memberikan gambaran bahwa antara subyek pajak dan wajib pajak berada pada pihak yang berbeda. Subyek pajak sebagai pihak yang mengkonsumsi hiburan yakni sebagai penonton atau yang menikmati hiburan, sementara wajib pajak adalah mereka yang menyediakan jasa hiburan itu. Dengan demikian maka sebenarnya pajak inipun merupakan jenis pajak tidak langsung.

Agak berbeda dengan Perda yang telah disebutkan di atas, Untuk Perda Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C mengenai subyek pajak dan wajib pajak diatur di Pasal 4, yang menyebutkan sebagai berikut:

(1) Subyek pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengeksploitasi atau mengambil bahan galian golongan C.

(2) Wajib pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi bahan galian golongan C.

Dari ketentuan tersebut di atas terlihat bahwa untuk subyek pajak mereka ini dapat mengeksploitasi atau mengambil bahan galian golongan C, atau dengan kata lain mempunyai potensi untuk dikenakan pajak. Sementara Wajib pajak mereka ini tidak hanya dapat melainkan telah melakukan aktivitas eksploitasi maupun pengambilan terhadap obyek pajak.

Untuk Perda yang mengatur Tentang Pajak Reklame, mengenai subyek pajak dan wajib pajak diatur di dalam Pasal 5 yang menyebutkan sebagai berikut:

1) Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame.

- 2) Wajib pajak ialah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

#### 4. Penetapan Utang Pajak

Untuk menentukan besarnya pajak terlebih dahulu harus diketahui mengenai dasar pengenaan pajak, sebagai jumlah yang dikenai pajak serta tarif yang diterapkan terhadap dasar pengenaan pajak tersebut. Dalam Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dasar pengenaan pajak adalah Nilai jual hasil pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, sementara besarnya tarif adalah sebesar 20%. Penentuan besarnya pajak dilakukan dengan mengalikan tarif dengan besarnya dasar pengenaan pajak. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dilakukan.

Dalam Pajak Hotel, dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel, sementara besarnya tarif adalah sebesar 10%. Penentuan besarnya pajak dilakukan dengan mengalikan tarif dengan besarnya dasar pengenaan pajak. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel.

Untuk Pajak Restoran sebagai dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Besarnya tarif yang diterapkan adalah sebesar 10 %. Besarnya pajak ditentukan dengan mengalikan tarif terhadap dasar pengenaan pajak. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel.

Di dalam Pajak Hiburan, yang dijadikan dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan. Sedangkan besarnya tarif yang digunakan adalah berkisar antara 10% sampai dengan 35%, tergantung jenis hiburan yang menjadi obyek pajak itu sendiri. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.



Untuk Pajak Reklame sebagai dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame. Besarnya tarif yang diterapkan adalah sebesar 25 %. Besarnya pajak ditentukan dengan mengalikan tarif terhadap dasar pengenaan pajak. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.

Di dalam Pasal 12 dari Perda Kabupaten Sleman Nomor 7 maupun Nomor 8 Tahun 2001 sama-sama diatur mengenai SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). Ketentuan dari pasal kedua Perda tersebut berbunyi sebagai berikut:

- (1) setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD wajib disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

Sementara itu di dalam Perda Kabupaten Sleman Nomor 2 tahun 1998, yang mengatur Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C mengenai hal serupa diatur di dalam Pasal 10. Untuk Perda Nomor 9 tahun 1998, mengenai hal sama diatur di dalam Pasal 11. Ketentuan Pasal 11 ini pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan ketentuan Pasal 12 dari Perda yang disebutkan di atas. Perbedaan hanya mengenai batas waktu penyampaian SPTPD yakni 15 hari setelah berakhirnya masa pajak, serta yang berwenang menentukan bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD adalah Kepala Daerah. Untuk Perda Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Pajak Reklame, mengenai hal tersebut diatur di dalam Pasal 12.

Dari ketentuan tersebut di atas terlihat bahwa ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak yakni untuk mengisi SPTPD. SPTPD sendiri merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk

melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Ketentuan tersebut di atas tidak menentukan apakah SPTPD itu wajib diambil sendiri oleh wajib pajak atau akan dikirimkan kepada wajib pajak. Berdasarkan SPTPD tersebut maka lalu ditetapkan besarnya pajak oleh Bupati di dalam SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah).

Di dalam Pasal 14 ayat (1) Perda Tentang Pajak Hotel dan Perda Tentang Pajak Restoran, atau juga di Pasal 13 ayat (1) Perda Tentang Pajak Hiburan, Pasal 12 ayat (1) Perda Tentang Pajak Pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan C, serta Pasal 14 ayat (1) Perda Tentang Pajak Reklame, ditentukan bahwa untuk wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD dipergunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

Dari ketentuan tersebut di atas maka terlihat ada dua kemungkinan untuk penetapan utang pajak, yakni ada utang pajak yang ditetapkan oleh Bupati di dalam SKPD yang besarnya ditentukan berdasar data dalam SPTPD, tetapi juga dibuka kemungkinan bagi wajib pajak untuk secara aktif menghitung, menetapkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang dengan menggunakan media SPTPD.

Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan: SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar), SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan), maupun SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil).

SKPDKB diterbitkan dalam hal:

- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi

berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

- b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

SKPDKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dan akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% ini tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. Sementara itu SKPDN diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB dan SKPDKBT yang tidak dibayar atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan.

#### 5. Pembayaran dan penagihan pajak

Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD,

SKPDKB, SKPDKBT dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati. Pembayaran pajak dilakukan dengan mempergunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah). Prinsip yang dipakai adalah bahwa pembayaran harus dilakukan sekaligus atau lunas, akan tetapi Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dalam hal terjadi pembayaran pajak secara angsuran maka harus dilakukan secara teratur dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Di samping itu Bupati juga dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

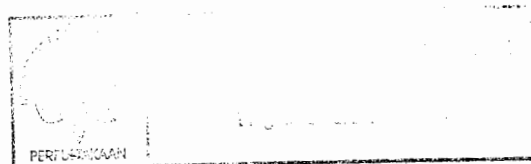
• Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya setelah jatuh tempo yang ditentukan, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran oleh pejabat yang berwenang. Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak terutang. Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat yang berwenang mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Setelah kantor lelang negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

#### 6. Ketentuan pidana

Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya 2 kali jumlah pajak yang terutang. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya 4 kali jumlah pajak yang terutang. Daluwarsa penuntutan terhadap tersangka pelaku tindak pidana adalah 10 tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak (Pasal 30 dan 31 Perda Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pasal 38 dan 39 Perda Tentang Pajak Hotel Pasal 35 dan 36 Perda Tentang Pajak Reklame, Pasal 37 dan 38 Perda Tentang Pajak Restoran, serta Pasal 34 dan 35 Perda Tentang Pajak Hiburan).

Ketentuan tersebut diarahkan kepada wajib pajak, yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Di samping itu di dalam Perda-perda tersebut juga diatur mengenai ancaman pidana bagi Pejabat yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.



Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat yang karena dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). (Pasal 40 Perda Tentang Pajak Hotel, Pasal 39 Perda Tentang Pajak Restoran, Pasal 37 Perda Tentang Pajak Reklame, dan Pasal 36 Perda Pajak Tentang Hiburan).

## **B. Pelaksanaan Perda Pajak Daerah di Kabupaten Sleman**

### **1. Administrasi dan Pendataan Potensi Pajak**

Pelaksanaan terhadap ketentuan pajak daerah dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen baik itu yang berada di dalam jajaran pemerintah kabupaten maupun di luar jajaran pemerintah kabupaten, termasuk di dalamnya masyarakat wajib pajak. Untuk melihat pelaksanaan ketentuan Pajak Daerah Di Kabupaten Sleman tentu tidak dapat dilepaskan dari proses awal pembentukan Peraturan Daerah yang menjadi acuan normative Pajak Daerah. Proses pembentukan Peraturan Daerah di bidang Perpajakan melibatkan instansi teknis terkait. Dalam hal

ini Badan Pengelola Kekayaan dan Keuangan Daerah, serta Biro Hukum Setwilda.

Pembentukan Perda di bidang Perpajakan dimaksudkan untuk mencapai peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Menjalankan amanat UU Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Di samping itu tujuan yang ingin dicapai adalah untuk melakukan pembinaan dan penyadaran masyarakat akan pentingnya pajak.

Proses pembentukan Perda di bidang Perpajakan dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Hal itu dilakukan antara lain dengan "public hearing" melalui mediaengar pendapat yang dilakukan secara intern instansi pengelola dengan Badan Pengelola Kekayaan dan Keuangan Daerah. Akan tetapi semenjak tahun 2002, forum ini dilakukan secara terpadu tidak hanya oleh Badan Pengelola Kekayaan dan Keuangan Daerah terhadap instansi pengelola, akan tetapi juga dikoordinasikan dengan Biro Hukum Setwilda.

• Pelaksanaan Perda di bidang Perpajakan dalam pengertian luas kiranya tidak hanya terbatas pada pemenuhan pembayaran pajaknya itu sendiri melainkan juga menyangkut hal-hal lain yang terkait. Hal dimaksud misalnya seperti perizinan, prosedur dan syarat-syarat administrative dan sebagainya yang kesemuanya akan menunjang dan terkait dengan pemenuhan kewajiban pajak. Sebagai contoh dalam pelaksanaan Perda No.8 Tahun 1998 Tentang Pajak Hotel dan Restoran yang kemudian diganti dengan Perda Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pajak Hotel, serta Perda Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Restoran, tentu juga terkait di dalamnya mengenai perizinan yang harus dipenuhi oleh mereka yang menjalankan kegiatan usaha hotel maupun restoran. Izin tersebut di antaranya adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMBB), Izin Gangguan (HO), dan Izin Usaha Kepariwisataaan (SIUK). Seberapa besar ketentuan perizinan ini dipenuhi kiranya dapat digunakan untuk memantau dan

menginventarisir jumlah subyek pajaknya. Akan tetapi di dalam kenyataannya mengenai hal ini belum bisa dipenuhi secara optimal. Penanganan mengenai perizinan itu sendiri dilakukan secara terpisah, sekalipun proses awalnya dilakukan dalam satu wadah yakni oleh UPTSA (Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap). Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan ditangani oleh Dinas Cipta Karya, Izin Gangguan (HO) ditangani oleh Dinas Trantib (Ketenteraman dan Ketertiban), serta Izin Usaha Kepariwisata menjadi wewenang Dinas Pariwisata. Sebagai gambaran dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman tercatat ada yang belum mempunyai SIUK tercatat 150 usaha. Artinya masih banyak jumlah mereka yang belum memenuhi ketentuan perizinan. Mengenai izin HO, Instansi yang menanganinya yakni Dinas Ketenteraman dan Ketertiban tidak mempunyai data berapa jumlah yang seharusnya memiliki dan berapa yang belum. Hal ini disebabkan karena belum pernah dilakukan pendataan mengenai hal ini. Di samping itu penanganan terhadap Izin gangguan oleh Dinas Ketenteraman dan Ketertiban ini memang relatif baru karena sebelumnya menjadi kewenangan Bagian Perekonomian. Selama ditangani oleh Dinas Ketenteraman dan Ketertiban, mulai Maret 2002, ada tegoran kepada sejumlah 14 orang yang belum mempunyai izin HO. Dari 14 orang tersebut ternyata 9 orang kemudian mempunyai reaksi positif yakni melakukan pengurusan izin.

Sementara itu mengenai IMB sulit untuk ditentukan berapa yang seharusnya dan berapa yang sudah. Hal tersebut mengingat selama ini belum pernah dilakukan pendataan secara intensif. Perlu kiranya diingat bahwa IMB tidak hanya berlaku secara terbatas bagi mereka yang akan melakukan/ memulai kegiatan usaha, melainkan juga berlaku bagi setiap warga masyarakat yang akan melakukan pendirian dan pembongkaran terhadap bangunan miliknya. Oleh karena itu tingkat kesulitan pendataan relatif lebih tinggi.



Tingkat keberhasilan pelaksanaan ketentuan Perda Perpajakan juga dapat dilihat dari berapa jumlah wajib pajaknya dan berapa persen mereka yang memenuhi kewajiban perpajakan itu. Jumlah wajib pajak ini tentu tak lepas dari adanya pemenuhan administrative berkaitan dengan pendaftaran dan perizinan. Data mengenai jumlah subyek pajak/ wajib pajak ini kiranya dapat dilihat pada catatan Instansi teknis yang membidangi kegiatan usaha itu.

Dalam kaitannya dengan Pajak Hotel, jumlah hotel dalam catatan yang ada pada Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Jumlah hotel dan pondok wisata menurut klasifikasinya di Kabupaten Sleman

No	KLASIFIKASI	JML.KAMAR	JML..HOTEL	KETERANGAN
1	Bintang V	697	3	
2.	Bintang IV	642	4	
3	Bintang III	213	2	
4.	Bintang II	66	1	
5.	Bintang I	160	4	
6.	Melati III	62	3	
7.	Melati II	244	12	
8.	Melati I	1.044	71	
9.	Pondok wisata	566	141	
	JUMLAH	3.694	241	

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman 2002.

Dari data tersebut terlihat betapa banyaknya jumlah hotel yang berlokasi di wilayah Kabupaten Sleman, baik itu yang berkualifikasi hotel berbintang maupun tidak. Hal tersebut dapat dipahami mengingat di dalam konteks Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah penyangga yang sangat strategis dan

potensial baik untuk pendirian sarana pendidikan, pariwisata, dan pemukiman. Kecenderungan pemilihan Sleman sebagai pilihan untuk melakukan kegiatan usaha kiranya juga menjadi salah satu pendorong yang menyebabkan mengapa banyak hotel di wilayah ini. Potensi ini tentu sangat baik dalam memberikan dukungan bagi pemasukan daerah khususnya melalui pajak Hotel. Kedekatan dengan sarana yang lain seperti Bandar Udara Adi Sucipto, kiranya memberikan peran yang besar dalam memotivasi mereka yang membuka usaha hotel di wilayah ini. Hal ini tentu diperhitungkan mengingat tingkat hunian juga dapat dipengaruhi oleh kedekatan dari sarana dan prasarana, apalagi kalau hal itu dikaitkan dengan pariwisata.

Sebagai gambaran tingkat hunian hotel baik yang berbintang maupun tidak, dapat dilihat dari data yang ada pada tahun 2000 sebagai berikut:

Tabel 2: Tingkat Hunian Hotel di Kabupaten Sleman

BINTANG/ NON BTG	ASAL	BULAN												JUMLAH
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
BINTANG	Manca	2334	2810	3580	4425	4031	4158	7333	6796	6042	5901	4410	3183	55003
	Nasional	24240	19829	20379	18007	15160	16899	32024	19319	21111	29582	25153	27485	269188
NON BTG	Manca	215	246	297	366	370	406	322	381	296	238	211	129	3477
	Nasional	26514	24159	26622	24860	24819	24780	27631	25672	25610	24887	23593	22021	301168
JUMLAH		53303	47044	50878	47658	44380	46243	67320	52168	53059	60608	53367	52818	628836

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman 2002.

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa tingkat hunian antara hotel berbintang dan hotel non bintang nampak adanya perbandingan yang sangat dinamis. Hal tersebut misalnya pada Bulan Januari sampai dengan Juni, jumlah mereka yang menginap di hotel non bintang lebih banyak. Sebaliknya pada Bulan Juli sampai dengan Desember justru keadaananya berbalik di mana proporsi hunian banyak terjadi pada hotel berbintang.

Sementara itu di wilayah Kabupaten Sleman juga banyak tersebar restoran dan rumah makan dari berbagai kelas, yang menyediakan sajian baik bagi masyarakat sekitar maupun wisatawan yang berkunjung ke wilayah ini. Gambaran mengenai restoran dan rumah makan tersebut khususnya yang sudah terdaftar pada Kantor Dinas Pariwisata adalah sebagai berikut:

Tabel 3: Jumlah Restoran dan Rumah Makan menurut klasifikasinya di Kabupaten Sleman

No	KLASIFIKASI	JML RES/ RM	JML.KURSI	KETERANGAN
1.	Salaka	5	1365	Restoran
2.	Gangsa	10	1589	Restoran
3.	A	12	1910	Rumah Makan
4.	B	36	1651	Rumah Makan
5.	C	53	1266	Rumah Makan
	JUMLAH	116	7781	

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman 2002.

Dari kedua kelas restoran yang ada terlihat bahwa restoran kelas gangsa relatif lebih banyak jumlahnya apabila dibandingkan dengan kelas salaka. Demikian juga dengan rumah makan, ternyata jumlah rumah makan dengan klasifikasi yang lebih rendah maka jumlahnya relatif lebih banyak. Hal tersebut kiranya akan lebih dapat terjangkau oleh lebih banyak konsumen karena berkaitan dengan daya beli masyarakat. Akan halnya restoran dan rumah makan tersebut, hanya terbatas pada restoran dan rumah makan yang terdaftar, di mana selain yang sudah terdaftar tersebut maka tentunya masih banyak lagi yang lainnya yang mungkin belum terdaftar.

Untuk obyek hiburan di wilayah Kabupaten Sleman yang telah terdaftar pada Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman relatif sedikit.

Hal tersebut dapat dilihat dalam gambaran pada table berikut ini:

Tabel 4: Obyek Hiburan di Kabupaten Sleman

No	JENIS	KLASIFIKASI	JUMLAH	KETERANGAN
1	Kafe		4	
2	Kolam pemancingan		4	Makan& minum
3	Candi		7	
4	Museum/ monumen		3	
5	Wisata alam		7	
6	Atraksi kesenian		3	
Jumlah			28	

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman 2002.

Data tersebut menunjukkan betapa minimnya jumlah obyek hiburan yang ada di wilayah Kabupaten Sleman dalam catatan Dinas Pariwisata. Dari keadaan yang demikian maka kiranya hanya sedikit wajib pajak dari sektor ini.

Gambaran yang diperoleh dari Dinas Pariwisata tersebut ternyata tidak semua menggambarkan realita yang sebenarnya. Hal itu semakin terlihat bilamana dihubungkan dengan data wajib pajak yang ada pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman. Menurut catatan yang ada pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman, jumlah wajib pajak untuk jenis pajak tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 5: Jumlah Wajib Pajak Daerah Kabupaten Sleman**

No	Uraian	1998	1999	2000	2001
1.	Pajak Hotel	225	227	231	282
2.	Pajak Restoran	1.090	1.151	1.169	1.238
3.	Pajak Hiburan	56	56	56	56
4.	Pajak B Gal.Gol.C	-	118	118	157
5.	Pajak Reklame	557	740	902	1.040
	Jumlah	1.928	2.292	2.476	2.773

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman 2002

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa jumlah wajib pajak dari kelima jenis pajak daerah tersebut yang paling banyak adalah pada Pajak Restoran, dan terbesar kedua adalah Pajak Reklame. Pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 Pajak Hotel dan Pajak Restoran masih digabung menjadi satu, akan tetapi dalam penyajian dalam table tersebut dilakukan secara terpisah dengan maksud untuk memilah antara keduanya.

Apabila dibandingkan dengan data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata maka dapat diperoleh beberapa perbedaan tertentu, yakni:

- a. Jumlah wajib pajak untuk Pajak Hotel menurut catatan dari Dinas Pendapatan Daerah sebanyak 282 (th.2001), sedangkan menurut catatan Dinas Pariwisata jumlah hotel yang terdaftar sebanyak 241 (th.2001);
- b. Jumlah wajib pajak untuk Pajak Restoran menurut catatan dari Dinas Pendapatan Daerah sebanyak 1238 (th.2001), sedangkan menurut catatan Dinas Pariwisata jumlah restoran dan rumah makan yang terdaftar sebanyak 116 (th.2001);
- c. Jumlah wajib pajak untuk Pajak Hiburan menurut catatan dari Dinas Pendapatan Daerah sebanyak 56 (th.2001), sedangkan menurut catatan Dinas Pariwisata jumlah Obyek hiburan sebagai obyek pajak yang terdaftar sebanyak 28 (th.2001);

Adanya perbedaan data tersebut antara lain disebabkan oleh karena sebagian wajib pajak merupakan wajib pajak yang belum mendaftarkan diri di Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Hal tersebut bisa disebabkan karena mereka belum memenuhi syarat untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Kepariwisata seperti izin Mendirikan Bangunan belum dipenuhi atau mungkin Izin HO-nya juga belum dipenuhi, sehingga mereka juga belum dapat mendapatkan izin usaha kepariwisataan. Sekalipun demikian mereka tetap membayar pajaknya, terbukti dari ketiga jenis pajak daerah tersebut semuanya lebih banyak jumlah yang dicatat oleh Dinas Pendapatan Daerah. Dari sisi intensifikasi pajak, maka hal demikian kurang kondusif. Hal ini disebabkan karena jumlah subyek pajak yang seharusnya dapat dipungut pajak tidak dapat digambarkan secara jelas, mengingat Dinas Pariwisata misalnya yang mestinya dapat memberikan gambaran potensi subyek pajak untuk ketiga jenis pajak daerah tersebut justru mempunyai data yang lebih kecil jumlahnya. Potensi-potensi riil dari subyek pajak mestinya dapat digali lagi antara lain melalui proses pendataan. Sekalipun jumlah subyek pajak/wajib pajak pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah relatif lebih besar, bukan berarti bahwa jumlah itu juga sekaligus menunjukkan potensi riil yang ada di masyarakat, mengingat ada kemungkinan dari warga masyarakat masih ada yang enggan memenuhi kewajiban pajaknya dan sekaligus tidak ditagih karena belum terdaftar.

## 2. Pelaksanaan Pembayaran Pajak

Pelaksanaan pemungutan pajak, khususnya Pajak Daerah di Kabupaten Sleman ditangani oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman, yang kemudian sejak tahun 2000 Bagian Keuangan dan Perlengkapan Dipenda tersebut melebur menjadi BPKKD (Badan Pengelola Kekayaan dan Keuangan Daerah). Di dalam pelaksanaan tugas pemungutan itu instansi ini telah diberikan target tertentu. Target ini dibagi menjadi dua, yakni target bersifat umum (target pendapatan) ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten

Sleman, sedangkan target operasional pungutan ditentukan oleh Dinas Pendapatan Daerah sendiri secara internal. Di dalam penentuan target pemungutan Pajak Daerah, digunakan dasar pertimbangan beberapa hal di antaranya berupa potensi yang ada, kendala-kendala, dan kemampuan instansi pemungut. Target tersebut sekaligus menjadi acuan capaian di dalam pelaksanaan pemungutan. Mengenai seberapa besar kelima jenis pajak daerah tersebut di atas yang ditargetkan dapat dilihat dalam gambaran sebagai berikut:



PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DARI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME,  
DAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Tabel 6

No	URAIAN	TH.1998/1999			TH.1999/2000			TH.2000/2001			TH.2001/2002		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Hot & Restoran	3.417.065.000	3.052.842.437	89	3.700.000.000	4.105.233.852	111	3.800.000.000	4.910.425.068	129	7.500.000.000	3.276.825.807	110
2	Hiburan	107.849.451	117.276.928	109	200.000.000	232.262.531	116	200.000.000	334.162.268	167	519.502.000	557.919.626	107
3	Reklame	318.000.000	309.498.507	97	411.633.333	385.649.629	94	308.725.000	315.077.374	102	536.866.478	577.864.878	107
4	Bahan gal Gol C	10.000.000	1.729.267	17	35.000.000	73.906.843	211	62.000.000	62.984.658	102	180.000.000	206.007.630	114
	JUMLAH	3.852.914.451	3.481.347.139	90	4.346.633.333	4.797.052.855	101	4.370.725.000	5.622.649.368	129	8.736.368.478	9.618.617.941	110

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman 2002



Dari apa yang telah ditargetkan sebagai penerimaan dari Pajak Daerah seperti tersebut di atas nampak bahwa sebagian tidak tercapai, terutama untuk tahun 1998/ 1999 dan 1999/ 2000. Hal seperti itu menurut sumber pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman disebabkan antara lain dari kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Di dalam pajak-pajak yang menggunakan *self assessment system* seperti yang diatur di dalam Perda perpajakan tersebut di atas, memang sangat dibutuhkan kesadaran dari wajib pajak. Hal tersebut mengingat di dalam *self assessment system* wajib pajak diberikan kepercayaan yang begitu besar untuk secara aktif memenuhi kewajiban perpajakannya, sebaliknya pihak fiscus relatif pasif. Di dalam Perda Pajak Daerah di Kabupaten Sleman nampak pula diterapkan tidak hanya *self assessment system* yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk memenuhi berbagai hal yang berkaitan dengan pajak secara administrative, akan tetapi juga termasuk di dalamnya adanya *self payment system*, di mana wajib pajak tidak lagi pasif dalam membayar pajak menunggu kalau ditagih melainkan mereka aktif untuk membayar pajak yang menjadi tanggung jawabnya. Kepercayaan itu akan dapat dipenuhi apabila wajib pajak yang diharapkan dominan melaksanakan kewajibannya tersebut secara sadar melakukan kewajibannya. Untuk menumbuhkan kesadaran dari wajib pajak kiranya tidak terlepas dari adanya pemahaman dari wajib pajak terhadap pajak itu sendiri, sebab kesadaran akan dapat tumbuh bila wajib pajak memahami arti pentingnya pajak dan merasakan manfaat yang ada dari pajak tersebut. Dengan demikian maka factor pembelajaran menjadi elemen penting dalam hal ini.

Di samping itu adanya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya dapat dipengaruhi oleh pengalaman yang pernah dialaminya dan realitas yang ada di sekitarnya. Bagaimana perlakuan dan apa yang dilakukan oleh wajib pajak lain kiranya menjadi pengalaman yang dapat mempengaruhi persepsi dari wajib pajak dan membentuk opini sendiri

yang akhirnya mempengaruhi sikap wajib pajak. Apabila wajib pajak menjalankan kewajibannya dengan baik melihat berbagai pengalaman yang terjadi di lingkungannya di mana misalnya apabila ada yang melanggar ketentuan atau tidak memenuhi kewajiban tidak ada tindakan terhadapnya, maka hal yang demikian dapat berpengaruh terhadap pelaku pelanggaran dan kesan tertentu bagi wajib pajak yang lain, bahkan dapat menimbulkan anggapan hal seperti itu menjadi hal yang biasa.

### C. Penegakan Hukum Perda Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sleman

#### 1. Penegakan Hukum Administrasi

Pelaksanaan ketentuan peraturan daerah di bidang perpajakan terkait erat dengan adanya penegakan hukum terhadap pelanggannya. Hal tersebut seperti telah disebutkan di bagian awal bahwa berjalannya sebuah norma hukum tidak hanya cukup sampai pada tahap formulasi yang baik, akan tetapi juga sampai pada tahap implementasi. Terkait dengan masalah tersebut adalah mengenai penegakan Hukum Administrasi. Sebagaimana diketahui bahwa proses penegakan Hukum Administrasi berbeda dengan proses penegakan Hukum Pidana. Penegakan Hukum Administrasi dilakukan oleh aparat pemerintah sendiri yang tidak melalui proses peradilan. Dalam hal ini yang menangani adalah aparat Pemerintah Daerah. Untuk memungkinkan pelaksanaan penegakan hukum yang tidak melalui proses peradilan tersebut maka di dalam perumusan normanyapun juga agak berbeda apabila dibandingkan dengan perumusan norma Hukum Pidana, yakni dalam hal ini perumusan sanksinya bersifat lebih pasti (*fixed sanction*), sehingga aparat yang melakukan penegakan Hukum Administrasi ini tidak memiliki ruang gerak di dalam penentuan besarnya sanksi.

Di dalam kaitannya dengan pelaksanaan Perda di bidang Perpajakan, khususnya menyangkut Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan ini sanksi administrasi dapat dikenakan terhadap beberapa hal, yakni:

- a. apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu 30 hari sejak diterimanya SKPD, sanksi administrasinya berupa bunga 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan;
- b. apabila berdasar hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak teruntangnya pajak;
- c. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak teruntangnya pajak;
- d. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak teruntangnya pajak;
- e. apabila ditemukan data baru dan diterbitkan SKPDKBT, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak;
- f. apabila kewajiban membayar pajak dalam SKPDKB dan SKPDKBT tidak dipenuhi maka diterbitkan STPD ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan.

Terhadap ketentuan tersebut pelaksanaan penegakan hukumnya, khususnya untuk lima jenis pajak daerah yakni Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C. Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame dapat dilihat seperti dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7: Pelanggaran Administrasi Perda Perpajakan Kab Sleman

No	Jenis Pajak	Th.2000	Th.2001	Keterangan
1.	Pajak Hotel	15	17	Tdk/ Terlambat membayar
2.	Pajak Restoran	39	29	Tdk/ Terlambat membayar
3.	Pajak Hiburan	1	0	Tdk/ Terlambat membayar
4.	Pajak Reklame	6	1	Tdk/ Terlambat membayar
5.	Pajak Galian Gol.C	8	0	Tdk/ Terlambat membayar
	Jumlah	69	47	

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman.

Dari semua pelanggaran administrasi tersebut terjadi karena adanya keterlambatan atau tidak dibayarnya pajak oleh wajib pajak. Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman, yang bertindak selaku fiscus adalah dengan memberikan surat tegoran, memberikan STPD dan tentunya dengan mengenakan sanksi administrasi berupa denda. Setelah menerima tagihan ternyata menurut keterangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman masih ada yang belum memenuhi kewajiban. Menurut ketentuan secara normative apabila wajib pajak tetap tidak mau memenuhi kewajibannya setelah menerima tagihan maka dapat diberikan surat tegoran dan surat peringatan, untuk kemudian langkah berikutnya diberikan surat paksa (Pasal 8 UU No.19 Tahun 1997 jo. UU No.19 Tahun 2000). Akan tetapi hal tersebut belum pernah dilakukan oleh fiscus, dengan pertimbangan apabila wajib pajak memang tidak mampu atau mengalami kesulitan maka apakah mereka masih harus dipaksa untuk memenuhi kewajiban pajaknya, terlebih sebagian dari mereka menutup usahanya. Sampai tahapan itu apabila dilihat dari maksud dari sanksi administrasi yang ditujukan untuk menghentikan perbuatan pelanggaran di bidang pajak, dan sifat sanksinya adalah *reparatoir* artinya untuk memulihkan keadaan, maka sebenarnya belum seluruhnya terpenuhi (bdk. Philipus M Hadjon et al 1994: 247). Melihat tingkat

pelanggaran yang terjadi khususnya terhadap ketentuan administrasinya maka dapat dikatakan relatif kecil. Akan tetapi jumlah mereka yang melakukan pelanggaran administrative seperti tersebut di atas belum tentu merupakan gambaran menyeluruh. Hal tersebut mengingat apabila dikaitkan dengan ketentuan Perda Perpajakan maka sangat luas sasaran pengenaan pajak itu. Bahkan penentuan obyek dan subyek pajaknya demikian luas. Demikian halnya wajib pajak yang dapat dikatakan melakukan kegiatan dan usaha itu secara insidental, yang mestinya dapat terjangkau akan tetapi belum dapat dijangkau. Hal yang demikian menurut keterangan dari BPKKD memang sangat mungkin dan tidak disangkalnya.

Hal lain terkait dengan penegakan hukum administrasi yang kiranya perlu untuk mendapatkan perhatian adalah mengenai pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku. Sementara petugas pada instansi terkait masih beranggapan bahwa penagihan pajak itu seperti layaknya pada penagihan utang perdata dan apabila tidak dipenuhi dapat dibawa ke pengadilan untuk digugat. Hal yang demikian tentu bukan semestinya, mengingat tagihan ini adalah tagihan yang ada dalam Hukum Pajak yang berkaitan dengan penggunaan kewenangan Hukum Publik oleh pemerintah selaku fiscus terhadap rakyat selaku wajib pajak. Konsekuensi adanya penggunaan kewenangan Hukum Publik adalah penggunaan kewenangan istimewa itu mengakibatkan pemerintah selaku fiscus dapat memaksakan secara sepihak. Tentu saja dengan menggunakan pijakan ketentuan hukum yang berlaku sebagai koridornya, tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Jadi walaupun dilakukan upaya paksa dengan penerbitan surat paksa, hal tersebut masih dalam kerangka penegakan Hukum Pajak sebagai bagian dari Hukum Publik, bukan seperti di dalam Hukum Perdata yang perlu digugat melalui pengadilan.

Kalaupun ada Pengadilan Pajak ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara, sebenarnya kedua Pengadilan tersebut tidak membawakan misi terutama untuk menegakkan Hukum Pajak dan Hukum Administrasi, melainkan lebih



mempunyai fungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah selaku penguasa. Pengadilan Pajak misalnya, di sana mempunyai peran dan tugas untuk menyelesaikan sengketa di bidang pajak yang terjadi karena tindakan dari pemerintah selaku fiscus dalam menetapkan utang pajak atau melakukan penagihan pajak dirasa merugikan rakyat selaku wajib pajak. Karena hubungan pemerintah dan rakyat dalam konteks Hukum Pajak adalah hubungan Hukum Publik yang menempatkan pemerintah tidak sederajat dengan rakyat, maka dalam hubungan ini apabila rakyat terganggu kepentingannya maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak. Oleh karena itu sekali lagi Pengadilan Pajak membawakan misi perlindungan hukum bagi rakyat.

Agak berbeda dengan penegakan hukum di bidang pajak, khususnya penegakan Hukum Administrasi. Penegakan hukum terjadi apabila rakyat selaku wajib pajak melakukan pelanggaran dan tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Penegakan hukum dilakukan sendiri oleh fiscus, bukan dilakukan oleh pengadilan.

## 2. Penegakan Hukum Pidana

Berbeda dengan penegakan Hukum Administrasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah sendiri, penegakan Hukum Pidana dilakukan melalui proses peradilan. Proses penegakan hukum ini dilakukan dengan diawali melalui proses penyidikan dan penyelidikan. Untuk proses penyidikan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang berkedudukan sebagai Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Wewenang penyidik tersebut di atas adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang bertanggung jawab. (Pasal 37 ayat (1) dan (2) Perda No.9 Tahun 1998 jls.Pasal 37 ayat (1) dan (2) Perda No.7 Tahun 2001, Pasal 36 ayat (1) dan (2) Perda No.8 Tahun 2001).

Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi

negara sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan ditemukan data bahwa penanganan penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana perpajakan ini dahulu berada di instansi teknis yakni Dipenda yang dikoordinasikan oleh Setwilda Kabupaten. Akan tetapi semenjak bulan Maret 2002 maka penanganan terhadap tindak pidana perpajakan ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang berada dalam koordinasi dan menjadi bagian dari Dinas Trantib (Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat).

Menurut keterangan dari Dinas Pendapatan Daerah, bahwa selama ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah ini pernah terjadi 2 kasus tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah yang terjadi pada tahun 1999. Kedua kasus ini menyangkut pajak Hotel dan Restoran yakni Wajib Pajak Gudeg Campur Sari dan Hotel Borobudur. Proses penyelesaiannya yakni sampai tingkat penyidikan, yang kemudian oleh yang bersangkutan pajak beserta dendanya telah dibayar lunas oleh karenanya penyidikan terhadap kedua kasus tindak pidana di bidang perpajakan tersebut kemudian tidak dilanjutkan. (Wawancara Pribadi: 11 Nov 2002). Dari kedua kasus tersebut ternyata satu di antaranya terjadi karena di dalam perusahaan sendiri telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah seorang karyawan yang dipercaya untuk membayarkan pajak tetapi tidak disetorkan. Hal yang menarik dari penanganan kasus tersebut di atas sebenarnya pada tahun 1999 itu Perda yang mengatur Tentang Pajak Hotel dan Restoran, akan tetapi di dalam pemeriksaan dan penyidikan, PPNS masih menggunakan Perda No.17 Tahun 1994 Tentang Pajak Pembangunan I yang sudah tidak berlaku lagi. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kekurangtahuan dari aparaturnya yang bersangkutan mengenai adanya Perda yang baru.

Penghentian penyidikan dengan alasan wajib pajak telah memenuhi kewajiban dan dendanya itu kiranya sejalan dengan kenyataan bahwa sarana hukum pidana itu bukan satu-satunya sarana untuk mencapai tujuan,



dan justru pada saat tertentu menjadi kurang efektif oleh karena terlalu banyak dipergunakan tanpa perlu dan berlebihan. Seperti dikatakan oleh Bambang Poernomo sebagai berikut: Dalam perkembangan terdapat kecenderungan kuat di tengah masyarakat bahwa para anggotanya untuk mematuhi hukum didasarkan rasa takut terkena sanksi negatif. Hal yang demikian ini mengakibatkan suatu keadaan apabila tidak ada organ yang mengawasi dengan ketat pelaksanaannya sebagai termaktub dalam dimensi social kedua (*social system*) dan dimensi ketiga (*social institution*) dan hukum tidak akan dipatuhi dengan cara menggunakan uang untuk menerobos membuat penafsiran yang leluasa atau terang-terangan berbuat melanggar hukum. Sebaliknya tumbuh suatu akibat dan kesan yang kuat, bahwa untuk mengendalikan masyarakat itu hanya mungkin dengan sarana hukum yang mempunyai pendukung sanksi. Hal tersebut tentu bertentangan dengan consensus dibentuknya masyarakat semula karena alasan ingin berkelompok, dan dengan berkelompok akan lebih mudah tercapai ketertiban. Selanjutnya akan muncul akibat, bahwa segala kepentingan akan diatur dengan hukum, terutama dalam bidang hukum pidana dengan harapan agar masyarakat mematuhi dengan ancaman sanksi negatif, walaupun dapat terjadi keadaan sebaliknya. Pada akhirnya sarana hukum itu sendiri lalu kurang efektif karena terlalu banyak dipergunakan tanpa perlu atau tanpa banyak perhitungan yang seksama mengenai manfaat atau tidaknya penerapan hukum pidana yang mengandung dimensi absolutisme dan keburukan stigmatisasi (Bambang Purnomo, 1988:89).

Dalam sumber lain ia mengatakan bahwa hukum bukanlah primadona sebagai upaya menanggulangi kejahatan untuk mencapai tertib social dalam kehidupan bermasyarakat. Norma hukum dapat bersama-sama berperan dengan norma lain di bidang politik, ekonomi, dan social budaya, akan tetapi ada kalanya norma-norma tersebut masing-masing dapat berperan sendiri untuk mencapai tertib social (Bambang Poernomo, 1983:8). Mengingat keterbatasan itu, maka system peradilan pidana harus dipandang sebagai

bagian dari politik kriminal yang merupakan bagian dari politik penegakan hukum, dan ini merupakan bagian dari politik social seperti pemikiran Hoefnagels (P.Hadisuprpto,1988:42).

Ada dua tujuan (ganda) dari politik social yakni suatu usaha rasional dari pemerintah untuk memberikan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang bagi bangsa Indonesia termuat dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut salah satu sarana yang digunakan adalah dengan menggunakan sarana penal atau upaya penegakan hukum pidana dalam kerangka politik kriminal yakni usaha rasional dari pemerintah dan masyarakat untuk mencegah kejahatan melalui bekerjanya system peradilan pidana. Berdasarkan pendekatan sistemik tersebut, maka dalam upaya mencegah kejahatan tersebut melibatkan berbagai sub system yang terkait dalam penegakan hukum pidana seperti struktur hukum atau kelembagaan dan aparatur yang terkait yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan (hakim), serta lembaga koreksi/ Lembaga pemasyarakatan beserta petugasnya, tanpa mengabaikan sub system substansi hukumnya yakni peraturan perundang-undangan yang terkait serta kultur/ budaya hukum yakni praktek dan kebiasaan, kekuatan, nilai, sikap masyarakat terhadap hukum, yang kesemuanya itu berada di luar substansi dan struktur hukum, namun mempunyai daya untuk mempengaruhi bekerjanya aparat penegak hukum dalam mengoperasionalkan hukum dalam masyarakat. Mengenai tujuan dari system peradilan pidana, sebenarnya meliputi tujuan jangka pendek yaitu resosialisasi pelaku tindak pidana, tujuan jangka menengah yaitu pengendalian kejahatan, dan tujuan jangka panjang adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984:158) .

Sementara itu menurut keterangan dari Kepala Seksi Penegakan Hukum Satpol Pamong Praja Kabupaten Sleman, bahwa sampai saat ini belum pernah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan yang ditangani oleh

instansi ini. Oleh karenanya juga belum ada yang sampai maju ke tingkat pengadilan (Wawancara pribadi: 16 Sept 2002).

Dari data seperti itu maka dapat dipahami bahwa kiranya pelanggaran Perda Perpajakan khususnya yang masuk dalam kualifikasi tindak pidana di Kabupaten Sleman sangat jarang terjadi. Hal tersebut dapat dipahami demikian itu mengingat tindak pidana di bidang perpajakan bukan termasuk dalam kualifikasi delik aduan, sehingga apabila ada dugaan bahwa telah terjadi perbuatan pidana di bidang perpajakan, penyidik tidak perlu menunggu adanya aduan dari masyarakat. Akan tetapi bisa jadi rendahnya jumlah tindak pidana yang muncul ke permukaan ini tidak menggambarkan realitas yang sesungguhnya di mana ada kemungkinan pula terjadinya pelanggaran tertentu terhadap Perda Perpajakan, akan tetapi mengingat nominal nilai ekonomisnya rendah maka lalu tidak dilakukan penyidikan dan penyelidikan oleh aparat yang berwajib.

Kenyataan mengenai rendahnya tindak pidana di bidang pajak ini tentu merupakan realitas yang positif, terutama kalau ini merupakan gambaran dari apa yang sesungguhnya terjadi secara keseluruhan, karena juga dapat dijadikan indikator bahwa masyarakat, khususnya para wajib pajak daerah di Kabupaten Sleman mempunyai kesadaran untuk memenuhi tanggung jawabnya. Keberhasilan seperti itu juga terkait erat dengan kebijakan kriminal untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana. Kebijakan kriminal ini merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas yakni kebijakan social (*social policy*), yang terdiri dari kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan social (*social-welfare policy*) dan

### BAB III

#### PENUTUP

##### A. Kesimpulan

Setelah diuraikan dan dianalisis hasil penelitian seperti tersebut di atas, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah di bidang Pajak Daerah sangat dipengaruhi oleh adanya pencapaian target penerimaan yang sejak awal sudah dicanangkan. Dari sisi capaian secara kuantitatif maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Perda Perpajakan untuk lima jenis Pajak Daerah yakni Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame relatif berhasil. Akan tetapi peran dari instansi terkait dalam memberikan dukungan pendataan dan penertiban administrasi guna menggali potensi pajak yang lebih besar, masih dirasa kurang. Hal yang demikian tentu akan mempunyai pengaruh tersendiri terhadap keberhasilan pemenuhan ketentuan perpajakan di masa mendatang. Hambatan yang terjadi di dalam pelaksanaan ketentuan Perda Perpajakan di Kabupaten Sleman antara lain berasal dari pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan.
2. Penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran ketentuan Perda Perpajakan dapat dibedakan menjadi dua, yakni penegakan hukum administrasi dan penegakan hukum pidana. Secara umum dapat dikatakan bahwa pelanggaran administrasi dan tindak pidana yang terjadi dalam bidang Pajak Daerah ini relatif kecil. Akan tetapi hal tersebut belum tentu merupakan potret dari keseluruhan realita yang ada. Hal tersebut terjadi mengingat di dalam Pajak daerah ini digunakan *self assessment system* dan *self payment system*, sehingga ada kemungkinan masih ada wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pajaknya, sekalipun sebenarnya secara yuridis mereka telah memenuhi

persyaratan yang dikehendaki oleh Peraturan Daerah yang ada. Seperti diketahui bahwa ketentuan Perda Perpajakan maka sangat luas dalam menentukan sasaran pengenaan pajak itu. Dalam melakukan penegakan hukum di bidang Perda Perpajakan dilakukan dengan lebih berorientasi kepada pencapaian hasil masukan uang pajak ke dalam kas daerah. Di samping itu pemahaman dari aparaturnya terkait terhadap ketentuan Perda Perpajakan dan ketentuan Hukum yang terkait di dalamnya dapat mempengaruhi pola kerja di lapangan.

## B. Saran

1. Penanganan berbagai persoalan secara bersama-sama antara instansi terkait dan tidak lagi secara sektoral dengan mengutamakan pendirian instansi masing-masing kiranya perlu mendapatkan perhatian. Dengan pola kerjasama dan saling mendukung untuk pencapaian tujuan secara optimal, diharapkan dapat dilakukan dengan membagi peran secara baik dan terkoordinasi. Penggalan potensi pajak dengan melakukan pendataan secara intensif kiranya dapat dilakukan di dalam mengoptimalkan potensi penerimaan dari sektor pajak di Kabupaten Sleman. Pemberian penyuluhan sebagai proses pembelajaran bagi wajib pajak untuk menumbuhkan kesadaran di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawab mereka di dalam memenuhi ketentuan hukum yang berlaku kiranya perlu dilakukan.
2. Penegakan hukum dengan mengutamakan hasil darinya yang berupa input berupa pemasukan dana bagi kas daerah, merupakan satu pilihan yang telah diambil oleh pihak instansi terkait. Dilakukannya tindakan penegakan hukum baik administrative maupun pidana terhadap pelaku pelanggaran secara intensif dan menyeluruh kiranya dapat mempunyai dampak kepada wajib pajak untuk tidak melakukan pengulangan dan memberikan kesan positif bagi wajib pajak yang lain, yang disertai dengan upaya pembekalan diri dari semua aparaturnya terkait mengenai pemahaman ketentuan hukum yang berlaku.

## Daftar Pustaka

- Bambang Poernomo, 1983, Azas-azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1988, Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana, Liberty, Yogyakarta.
- Ma'rat, 1982, Pengantar Psikologi Sosial.
- P.Hadisuprpto, 1988, Manfaat Tindakan Non Hukum Pidana Dalam Menunjang Sistem Peradilan Pidana, Tesis Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Philipus M Hadjon et all, 1994, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Administrative Law), Gadjahmada University Press, Yogyakarta.
- Prajudi Atmosudirjo, 1981, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia Jakarta.
- Richard A Musgrave & Peggy Musgrave 1984, Public Finance in Theory and Practice, Fourth edition, McGraw-Hill.
- Rochmat Soemitro 1991, Asas dan Dasar Perpajakan II. PT.Eresco, Bandung
- \_\_\_\_\_, 1992, Asas dan Dasar Perpajakan I, PT.Eresco, Bandung
- Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Sutrisno Hadi, 1987, Metodology research, Fak.Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

